

TESIS

**PEMENUHAN HAK KESEHATAN MASYARAKAT
DI DAERAH TERPENCIL, PERBATASAN DAN KEPULAUAN
(DTPK) MELALUI PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT
APUNG OLEH KAPAL REPUBLIK INDONESIA
DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO – 991 (KRI WSH – 991)**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2026

**PEMENUHAN HAK KESEHATAN MASYARAKAT
DI DAERAH TERPENCIL, PERBATASAN DAN KEPULAUAN
(DTPK) MELALUI PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT
APUNG OLEH KAPAL REPUBLIK INDONESIA
DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO – 991 (KRI WSH – 991)**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan

Diajukan oleh:

INDRA WIDJAYANTO
NIM 24.C2.0013

Kepada

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2026

ABSTRAK

Pemenuhan hak atas kesehatan merupakan kewajiban konstitusional negara yang harus diwujudkan secara merata, termasuk bagi masyarakat di Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) yang memiliki keterbatasan akses layanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum, praktik penyelenggaraan Rumah Sakit Apung (RS Apung) KRI dr. Wahidin Sudirohusodo-991 (KRI WSH-991), serta kontribusinya dalam pemenuhan hak kesehatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara mendalam, dan observasi, kemudian dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat berbagai regulasi terkait hak kesehatan, belum ada pengaturan khusus mengenai RS Apung. Secara praktis, KRI WSH-991 mampu meningkatkan akses layanan kesehatan di wilayah DTPK, namun masih menghadapi kendala dalam keberlanjutan layanan, koordinasi antarinstitusi, dan aspek legalitas operasional. Dari perspektif hak asasi manusia, layanan ini telah memenuhi aspek ketersediaan dan aksesibilitas, tetapi masih memerlukan penguatan pada kualitas dan keberlanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa RS Apung merupakan inovasi strategis dalam pemerataan layanan kesehatan, namun memerlukan penguatan regulasi dan sinergi lintas sektor agar lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Hak atas Kesehatan, DTPK, Rumah Sakit Apung, KRI WSH-991, Pelayanan Kesehatan, Hukum Kesehatan

ABSTRACT

The fulfillment of the right to health is a constitutional obligation of the state that must be realized equitably, including for communities in Remote, Border, and Archipelagic Areas (DTPK) with limited access to healthcare services. This study aims to analyze the legal framework, the implementation of the Floating Hospital (RS Apung) KRI dr. Wahidin Sudirohusodo-991 (KRI WSH-991), and its contribution to the fulfillment of the right to health. This research employs a qualitative method with a socio-juridical approach. Data were collected through literature review, in-depth interviews, and observation, and analyzed using thematic analysis. The findings indicate that although various regulations on the right to health exist, there is no specific legal framework governing floating hospitals. In practice, KRI WSH-991 has improved access to healthcare services in DTPK areas, yet challenges remain in terms of service sustainability, inter-agency coordination, and operational legality. From a human rights perspective, the service has met aspects of availability and accessibility, but still requires improvement in quality and sustainability. This study concludes that floating hospitals represent a strategic innovation in expanding healthcare access; however, stronger regulatory support and cross-sector collaboration are needed to ensure effectiveness and sustainability.

Keywords: *Right to Health, Remote Border and Archipelagic Areas (DTPK), Floating Hospital, KRI WSH-991, Healthcare Services, Health Law*